

# JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial



**RECONSTRUCTING URBAN MUSLIM ENTREPRENEUR PROGRAM  
ON VOLUNTARY ALMSGIVING: Deconstruction, Social Theology and Plurality**

*Roma Ulinuha*

**GEN-Z MUSLIMS, SOCIAL MEDIA AND FORMLESS-SPIRITUAL:  
An Explorative Study of Mosque Youth in Medan City**

*Ziaulhaq Hidayat*

**THE LIFE OF THE NIQAB AND SIRWAL;  
Phenomenological Study of Family Power Relations to Stigma**

*Mohammad Maulana Iqbal*

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA**

JURNAL  
**SOSIOLOGI AGAMA**

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

---

Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2023

---



**JURNAL SOSIOLOGI AGAMA:**  
Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial  
Program Studi Sosiologi Agama  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

# JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2023

## Editor in Chief

Moh Soehadha

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

## Managing Editor

M Yaser Arafat

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

## Peer-Reviewers

Amin Abdullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Al Makin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Abdul Mustaqim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Hasan Sazali

Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara  
Medan

Zuly Qodir

Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta

Soni Akhmad Nulhaqim

Universitas Padjajaran, Jawa Barat

Anif Fatma Chawa

Universitas Brawijaya, Malang

Muhammad Najib Azca

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jajang A Rohmana

Univeristas Islam Negeri Sunan Gunung Jati  
Bandung

## Editor

Nurus Sa'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Inayah Rohmaniyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Ustadi Hamzah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Ahmad Izudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,  
Yogyakarta

Wawan Sobari

Universitas Brawijaya,  
Malang

Pardamean Daulay

Universitas Terbuka, Surabaya

I Nyoman Ruja

Universitas Negeri Malang

Maulana S Kusumah

Universitas Jember, Jawa Timur

Erda Rindrasih

Utrecht University, Netherland

Fina Itriati

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta



# JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2023

## DAFTAR ISI

<b>RECONSTRUING URBAN MUSLIM ENTREPRENEUR PROGRAM ON VOLUNTARY ALMSGIVING: Deconstruction, Social Theology and Plurality</b>	
Roma Ulinnuha .....	1
<b>GEN-Z MUSLIMS, SOCIAL MEDIA AND FORMLESS-SPIRITUAL: An Explorative Study of Mosque Youth in Medan City</b>	
Ziaulhaq Hidayat.....	17
<b>THE LIFE OF THE NIQAB AND SIRWAL; Phenomenological Study of Family Power Relations to Stigma</b>	
Mohammad Maulana Iqbal.....	33
<b>MODERASI BERAGAMA DI PAPUA: Rekonstruksi Identitas dan Resolusi Kehidupan Keagamaan Pasca Konflik Papua 1998-2001</b>	
Luqman Al Hakim & Dudung Abdurrahman.....	49
<b>TRANSFER KAPITAL: Studi Praktik Ulama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat</b>	
Maulana Janah .....	65
<b>TIONGHOA MUSLIM DI MADURA: Asimilasi Budaya dan Interaksi Sosial</b>	
Akhmad Siddiq & Mutamakkin Billa.....	87

---

## **MODERASI BERAGAMA DI PAPUA: Rekonstruksi Identitas dan Resolusi Kehidupan Keagamaan Pasca Konflik Papua 1998-2001**

**Luqman Al Hakim**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
*luqmanibnusuud@gmail.com*

**Dudung Abdurrahman**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
*dudung.abdurrahman@uin-suka.ac.id*



### **Abstrak**

Artikel ini menganalisis fenomena moderasi beragama di Papua masa kontemporer. Masalah ini merupakan fenomena yang menarik, karena semenjak Papua menjadi bagian dari Indonesia pada 1969 perkembangan sosial-keagamaan di wilayah ini seringkali diwarnai suasana disharmoni antar pemeluk agama-agama, bahkan suasana demikian turut mewarnai konflik Papua 1998-2001. Akan tetapi pasca konflik tersebut, program dan penyuluhan moderasi beragama dilaksanakan secara masif. Penelitian ini berupaya merekonstruksi identitas keagamaan yang menyokong resolusi kehidupan keagamaan pasca konflik di Papua. Artikel ini berfokus pada permasalahan mengapa moderasi beragama terjadi dan bagaimana implikasinya bagi kehidupan beragama di Papua dewasa ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sejarah dan sosial-keagamaan, serta menggunakan metode penelitian sejarah yang di dalamnya terdapat empat tahapan, yaitu: Heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Adapun temuan penelitian ini, yaitu: *Pertama*, peristiwa konflik 1998-2001 di Papua secara garis besar disebabkan kurangnya sikap nasionalisme dan menghargai sesama warga. *Kedua*, upaya moderasi keagamaan pasca konflik telah dilakukan segenap agama dan ormas di Papua. Para pemuka agama-agama: Islam, Kristen, Hindu, dan Budha telah berperan dalam resolusi dan harmonisasi kehidupan beragama di Papua. *Ketiga*, moderasi keagamaan di Papua memberikan dampak yang besar bagi aspek sosial dan agama. Persaudaraan di Papua tidak memandang agama, suku, dan budaya, dan isu-isu seputar Papua merdeka merupakan isu yang merusak harmoni di Papua.

*Kata Kunci: Konflik Sosial, Moderasi Beragama, Perubahan Sosial-keagamaan, dan Papua.*

## Abstract

This article analyzes the phenomenon of religious moderation in contemporary Papua. This problem is an interesting phenomenon, because since Papua became part of Indonesia in 1969, socio-religious developments in this region have often been colored by an atmosphere of disharmony between adherents of religions, and this atmosphere even contributed to the 1998-2001 Papuan conflict. However, after the conflict, religious moderation programs and counseling were carried out massively. This research seeks to reconstruct religious identity that supports the resolution of post-conflict religious life in Papua. This article focuses on the problem of why religious moderation occurs and what the implications are for religious life in Papua today. This research was conducted with a historical and socio-religious approach, as well as using historical research methods in which there are four stages, namely: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The findings of this study are: First, the 1998-2001 conflict in Papua was largely caused by a lack of nationalism and respect for fellow citizens. Second, post-conflict religious moderation efforts have been carried out by all religions and mass organizations in Papua. Religious leaders: Islam, Christianity, Hinduism, and Buddhism have played a role in the resolution and harmonization of religious life in Papua. Third, religious moderation in Papua greatly impacts social and spiritual aspects. Brotherhood in Papua does not look at religion, ethnicity, and culture, and issues surrounding an independent Papua are issues that undermine harmony in Papua.

*Key Words: Social Conflict, Religious Moderation, Socio-Religious Change, and Papua.*



## PENDAHULUAN

Penelitian tentang perkembangan sosial di wilayah Papua merupakan suatu kajian yang selalu menarik perhatian banyak pihak. Wilayah Papua dalam geografi Indonesia sendiri berbatasan laut meliputi: sebelah utara Laut Filipina, sebelah selatan Laut Arafuru, sebelah timur Samudra Pasifik, sebelah barat Laut Arafuru dan Laut Banda. Adapun batas daratan wilayah tersebut adalah: sebelah Barat Kepulauan Palau, sebelah selatan Australia, sebelah Timur PNG (Papua Nieuw Guinea), dan sebelah barat Kepulauan Maluku. (Setyaningrum 2022)

Papua pada masa kontemporer tidak lepas dari gejolak politik Indonesia pada tahun 1998. Kejatuhan Orde Baru menandai perubahan pendekatan politik Indonesia kepada Papua. Bahkan tahun 1998 merupakan titik balik perjuangan bagi Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia dengan dikibarkan Bendera Bintang Kejora sepanjang tahun 1998-1999 di seluruh wilayah Papua, dan telah memicu konflik secara vertikal maupun horizontal. Pada tahun 1999 Presiden BJ Habibie mengundang 100 tokoh Papua untuk membahas keberlangsungan provinsi tersebut. Dalam pertemuan ini Tom Beanal tokoh Papua dengan lantang menyuarakan kemerdekaan Papua di depan Habibie, sehingga makin memperpanjang konflik hingga 2001. Konflik 1998-2001 juga telah merusak perdamaian di Papua dengan banyaknya pengrusakan fasilitas publik, dan munculnya trauma dari berbagai kalangan.

Konflik 1998-2001 tersebut menjadi noda hitam bagi toleransi dan harmoni di Papua. Menurut SKP (Sekertariat Keadilan dan Perdamaian) akar konflik tersebut terbagi menjadi 4 kategori, yakni; *Pertama*, masalah budaya, yakni suasana peralihan yang begitu cepat dan mengakibatkan masyarakat kehilangan pegangan dan nilai-nilai. *Kedua*, masalah kemajemukan yakni semakin banyaknya pendatang yang datang ke Papua terbukti pada 1999 berdasarkan sensus BPS jumlah pendatang sebanyak 42% dari total penduduk Papua, pendatang memiliki *skill* yang mumpuni sedangkan orang asli masih belum punya dan tersingkir. *Ketiga*, masalah kesejahteraan yakni munculnya kesenjangan antara pendatang dan orang asli, ataupun orang Papua Pantai dan Papua Pegunungan sehingga memunculkan kecemburuan serta sikap intoleran. *Keempat*, masalah hak-hak dasar. (Elisabeth, Widjojo, and Pamungkas 2005, 42)

Pasca konflik 1998-2001, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan kemanusiaan dalam membangun Papua. Pemekaran Papua menjadi bom waktu di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada tahun 2000 demi memperoleh simpati rakyat Papua, Gus Dur berkunjung ke Jayapura, mengangkat Gubernur Papua Fredy Numbery menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, dan secara terbuka Gus Dur meminta maaf atas pelanggaran HAM yang dilakukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) kepada rakyat Papua. Kemudian kerusuhan yang terjadi di Papua menurun pasca diberlakukannya Otonomi Khusus pada 21 November 2001 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. (Pulungan 2017, 517–18)

Selanjutnya implementasi pendekatan tersebut juga dilakukan dengan memunculkan lima rekomendasi kebijakan bagi Papua, yaitu: 1) melakukan pembatasan luas, intensitas dan keterbukaan konflik politik di Papua secara persuasif, 2) menuntaskan konflik secara institusional; 3) memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat melanggar Hak Asasi Manusia, dan undang-undang yang berlaku; 4) menciptakan stabilitas konsensual, dan 5) menghasilkan resolusi konflik dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Resolusi tersebut terwujud pada 2006 di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dengan terbentuknya Lembaga adat Papua dan MRP (Majelis Rakyat Papua). (Mambraku 2016, 75)

Kondisi sosial keagamaan di Papua pasca konflik semakin baik, berbagai ormas keagamaan mengampanyekan slogan zona damai. Kalangan Gereja Keuskupan Jayapura bersama umat muslim Papua dan Pemerintah Provinsi Papua membentangkan spanduk *Save Papua*. Dampak slogan zona damai ini sangat besar bagi kalangan muslim dan non-muslim di Papua. Wacana tersebut memperkuat tekad memperjuangkan kemajuan Papua dengan cara damai. Berbagai seminar dan dialog lintas agama telah dilakukan oleh berbagai pemuka agama melalui MUI, FKUB, Kalangan Gereja, dan Keuskupan Jayapura. Diskusi dan tulisan agenda damai telah dikembangkan tim SKP (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian) Keuskupan Jayapura dengan terbitnya buku *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi*. Kesepakatan menjadi kata kunci dalam membangun Papua yang telah disetujui berbagai kalangan demi mewujudkan Papua yang damai dan toleran. (Elisabeth, Widjojo, and Pamungkas 2005, 55–57)

Perubahan tata kelola pemerintah daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan Papua telah mengalami perubahan yang berarti pasca 2001. Otsus menjamin adanya Hak Asasi Manusia di Papua dengan hadirnya Otsus dibentuklah MRP (Majelis Rakyat Papua) pada 2005. (Martanto 2007, 177) Pasca 2001 keadaan Papua semakin membaik khususnya dalam sikap toleransi dan moderasi beragama. Jayapura menjadi kota role model dalam toleransi di Papua. Toleransi di Jayapura

disebabkan beberapa faktor, antara lain: perkawinan, slogan Jayapura kota damai, dan kemajemukan masyarakat. Karena itu, pemimpin dan masyarakat beragama tidak membedakan ras, kulit, suku, dan agama dalam mengokohkan perdamaian. Sikap persaudaraan tersebut telah memperkuat nilai solidaritas yang melahirkan harmoni dan persatuan, sehingga menjadikan Papua lebih damai dan toleran. (Siswanto 2016, 235–37)

Konflik 1998-2001 memberikan pembelajaran bagi penduduk Papua agar semakin berbenah dalam hubungan sesama masyarakat pendatang maupun antar masyarakat pendatang dan masyarakat asli Papua. Pasca 2001 semakin banyak upaya-upaya yang dilakukan organisasi muslim dan non muslim dalam mengokohkan perdamaian di tanah Papua. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah dialog antaragama, sosialisasi dan seminar moderasi agama, dan sikap terbuka kepada semua agama dan golongan masyarakat di Papua.

Berdasarkan uraian di atas artikel ini mengkaji moderasi beragama di Papua pasca konflik 1998-2001, yang dianalisis dari perkembangan sosial-keagamaan di wilayah tersebut hingga dewasa ini. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang sosial-keagamaan di Papua, antara lain: Ridwan (2022), mengkaji tentang pertumbuhan radikalisme, pembangunan perdamaian, dan dialog antar umat beragama. Penelitian tersebut berfokus pada peranan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan FKPPA (Forum Komunikasi Tokoh Agama) dalam menjaga perdamaian di Papua. (Ridwan 2022, 69) Luqman (2022), mengkaji tentang kerukunan umat beragama di Jayapura yang dipelopori MUI Papua penelitian ini berfokus pada kontribusi MUI Papua dalam membangun hubungan antaragama dan kedamaian di tanah Papua. (L. A. Hakim 2022a, 5)

Luqman (2022), mengkaji tentang multikulturalisme dan bantahan Islamisasi di Kabupaten Jayapura. Munculnya isu Islamisasi telah memancing kemarahan kalangan non-muslim di Jayapura dengan menuduh pemerintah Indonesia mendukung agenda Islamisasi Jayapura. Penelitian ini lebih berfokus pada multikulturalisme dan bantahan isu Islamisasi yang ada di Jayapura oleh pemerintah Indonesia. (L. A. Hakim 2022b, 163) Ahmad Syarif Makatita dkk (2022), mengkaji tentang upaya menjaga harmoni antaragama melalui akulturasi tradisi lokal di kalangan Suku Dani Muslim. Artikel ini berfokus pada pola identitas interaksi sosial diantara komunitas Dani di Jayawijaya Papua yang diimplementasikan dengan adat bakar batu. (Makatita, Husain, and Harahap 2022, 59) Adapun penelitian ini terfokus pada moderasi beragama dan resolusi kehidupan umat beragama di Papua.

Pokok permasalahan penelitian ini adalah mengapa upaya-upaya moderasi beragama terjadi di Papua, dan bagaimana implikasinya terhadap sosial-keagamaan di wilayah tersebut. Artikel ini berusaha membahasnya secara mendalam berdasarkan dikusi mengenai konflik di Papua pada 1998-2001, termasuk di dalamnya tentang akar konflik, solusi pemerintah, dan dampak dari konflik tersebut. Kemudian didiskusikan identitas agama ataupun situasi kehidupan beragama, berbagai langkah yang dilakukan kelompok-kelompok agama dalam mewujudkan perdamaian dan harmoni, dan respon berbagai umat beragama di Papua terhadap pentingnya toleransi dan harmoni antar agama. Artikel ini pada akhirnya dapat menjelaskan alasan-alasan dilakukan sikap moderat dalam beragama serta dampak moderasi beragama di Papua.

## METODOLOGI

Penelitian ini pada dasarnya berkenaan dengan sosial-keagamaan, sehingga didasarkan pada perspektif sosiologi. Namun pembahasan serta analisis penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah. Fenomena sosial dalam penelitian ini dipelajari dengan mengacu kerangka konseptual dan teoretis tentang: 1) *moderasi beragama*, yaitu proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan berimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih saat mengimplementasikannya. (Kementerian Agama 2019, iii) 2) *konflik sosial*, antara lain menurut Lewis A Coser adalah perjuangan terhadap nilai dan pegakuan dalam status yang langka, kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan yang dieliminir saingannya. (Alwi 2016, 9) 3) *perubahan sosial*, adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sosialnya, yang di dalamnya terkandung nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. (M. L. Hakim 2021, 11)

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu seperangkat aturan dan prinsip-prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesa dalam bentuk tertulis. Untuk ini prosedur penelitian dilakukan dengan metode heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. (Abdurrahman 2019, 111–13)

## PEMBAHASAN

### Konflik Papua 1998-2001

Secara garis besar berbagai ketegangan yang terjadi di Papua tidak bisa dipisahkan dari sentimen kebangsaan (ke-Papuaan) yang telah ditanamkan oleh Belanda sebelum meninggalkan pulau tersebut. Sehingga menjadikan lemahnya nasionalisme Indonesia di Papua, Menurut kajian yang dilakukan Meteray nasionalisme Indonesia masih dalam tahapan penyemaian di beberapa wilayah Papua, seperti; Jayapura pada akhir 1945, Serui 1946, Biak 1948, dan Sorong 1950. Sebagian besar wilayah Papua belum tersentuh oleh pemerintah Indonesia baik di pantai atau pedalaman pegunungan Papua. Ketika nasionalisme Indonesia mulai bertumbuh di Indonesia terjadi perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain hal tersebut disebabkan luasnya Papua dan kurangnya akses pemerintah Indonesia kepada Papua. Sehingga dapat ditegaskan bahwa antara 1945-1969 terjadi dominasi nasionalisme Papua dari pada nasionalisme Indonesia di Papua. (Metray and Wabiser 2019, 4) Oleh sebab itu tidak menjadi sebuah hal yang baru jika masyarakat Papua yang bergabung menjadi OPM hingga kini menyerukan untuk memisahkan diri dari Indonesia yang pada akhirnya melahirkan konflik berkepanjangan antara 1998-2001.

Fakta tersebut berdasarkan pemaparan bahwa nasionalisme antara satu wilayah di Papua dengan wilayah lainnya berbeda. Terdapat beberapa alasan mengapa nasionalisme Papua lebih berkembang dari pada nasionalisme Indonesia pada 1962, yakni; 1. Mayoritas masyarakat Papua memeluk agama Kristen, 2. Terdapat penggunaan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar kehidupan masyarakat Papua, bahasa melayu merupakan bahasa pemersatu bagi suku-suku yang berada di Papua, bahasa tersebut digunakan sebelum Papua masuk ke dalam wilayah Indonesia, 3. Letak geografis Papua yang berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG), 4. Meningkatnya media masa seperti koran dan radio yang gencar menyiarkan nasionalisme Papua baik di Papua maupun ke luar negeri, 5. Meningkatnya

masyarakat urban intelek di beberapa kota besar di Papua seperti Jayapura, dan Manokwari, sehingga menjadikan menyebarnya gagasan dan pemikiran nasionalisme Papua bagi masyarakat Papua. (Metray 2015, 30)

Ketegangan di Jayapura pada 1998 merupakan buah dari berbagai ketegangan yang terjadi di Papua sejak awal bergabungnya provinsi tersebut ke Indonesia. Pada akhir orde baru terjadi pula ketegangan di Pegunungan Tengah Papua yang meletus di tahun 1996, ketika itu anggota OPM menyandra sekelompok peneliti satwa liar yang berasal dari Indonesia dan luar negeri. Tahun 1997 menjadi masa yang kelam bagi masyarakat di Pegunungan karena terjadi penembakan secara brutal dan menewaskan puluhan korban termasuk pendatang dan orang asli Papua. Kerusuhan tersebut merembet ke Jayapura pada 1998 dengan maraknya demonstran dari berbagai kalangan yang menuntut adanya referendum kemerdekaan bagi Papua. Kemudian pada 28 dan 29 Mei 1998 demonstrasi digelar di depan parlemen Provinsi Papua di Jayapura. Keadaan semakin mencekam dengan terbunuhnya 3 orang transmigran yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Arso. Bulan Juli-Desember 1998 Jayapura dalam keadaan genting hingga menimbulkan kecemasan di kalangan pendatang. Sementara itu, seluruh pemuka agama melibatkan diri dengan menenangkan pendatang transmigran, sehingga secara berangsur kecemasan mulai berkurang di kalangan pendatang. (Human Rights Watch 1998)

Dengan meningkatnya ketegangan Papua pada Februari 1999 Presiden BJ Habibie menerima sebuah delegasi yang disebut Tim 100 sebagai perwakilan masyarakat Papua yang ingin mengekspresikan tuntutan kemerdekaan Papua. Pemerintah Indonesia menyikapi tuntutan tersebut dengan memecah Papua demi integritas teritorial NKRI, maka dikeluarkanlah UU No. 45 Tahun 1999. Pemecahan tersebut menjadikan Irian Jaya (Papua) menjadi 3 bagian: Irian Jaya Timur, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Barat. (Sugandi 2008, 6) Berdasarkan dekrit Presiden No. 327 Tahun 1999 tertanggal 12 Oktober 1999, Presiden BJ Habibie mengangkat Herman Monim, Wakil Gubernur Irian Jaya menjadi Gubernur Papua Barat. Meskipun dekrit tersebut ditolak oleh DPRD Irian Jaya melalui SK No. 1/DPRD/1999 tanggal 16 Oktober 1999 berdasarkan masyarakat Irian Jaya, tetapi proses pemekaran Irian Jaya Barat tetap berlangsung, berjalan aman dan damai. Berbeda dengan deklarasi Irian Jaya Tengah yang diwarnai bentrok antara kubu pro dan kontra yang menewaskan 4 orang: dua orang dari masing-masing kubu. (Hamid 2019, 79)

Kebijakan pemekaran Irian Jaya tersebut juga pada mulanya ditolak dengan berbagai aksi demonstrasi di berbagai kota di Papua, salah satunya di Jayapura dengan jatuhnya kantor DPRD Kabupaten Jayapura dan kantor Gubernur Irian Jaya (Papua) kepada demonstran pada 14-15 Oktober 1999. Alasan utama dari penolakan pemekaran ini ialah tidak adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan tetua adat lokal Papua, sebab dalam perkara tanah pemerintah diharuskan melakukan pelepasan adat sebelum membangun suatu bangunan di tanah Papua. Sistem tanah adat masih berlaku hingga kini sehingga menjadikan Papua sebagai lahan basah dalam konflik tanah. (Sugandi 2008, 7)

Pasca turunnya Habibie dan diangkatnya Gus Dur menjadi presiden pada 20 Oktober 1999, terjadi perbedaan pendekatan dalam menuntaskan konflik di Papua. Gus Dur lebih terbuka dan fleksibel dalam kasus Papua, Gus Dur juga menghabiskan malam tahun baru di Papua yang belum pernah terjadi pada presiden-presiden Indonesia sebelumnya, Gus Dur juga mengizinkan upacara

berkibarnya Bendera Bintang Kejora yang diadakan pada 1 Desember 1999. Orang-orang Papua juga diizinkan untuk melakukan mubes (Musyawarah Besar) yang dilakukan pada 23-26 Februari 2000 dan dihadiri ribuan orang dari seluruh Papua. Selain itu demi mencari jalan keluar dari konflik Papua Gus Dur menyetujui otonomi khusus bagi Papua dan Aceh, sehingga pada tahun 2001 mewujudkan UU Otonomi Khusus sebagai jalan tengah konflik Papua yang telah dimulai pada 1998. (Muryantini 2018, 52) Pada 23 Juli 2001, UU Otonomi Khusus disahkan bagi Papua. UU ini merupakan “win-win solution” dan merupakan hasil aspirasi masyarakat secara langsung. (Muryantini 2018, 53)

Pada tahun 2000 terjadi kerusuhan dan pengrusakan fasilitas publik di Wamena, sehingga banyak masyarakat pendatang yang berasal dari luar Papua mengungsi. Masyarakat merasakan ketakutan disebabkan terdengarnya suara tembakan senjata api dari berbagai arah dalam kerusuhan tersebut anak-anak dan wanita diungsikan ke Jayapura, sedangkan bagi laki-laki kepala rumah tangga tetap bertahan di pengungsian yang telah disediakan pemerintah di Wamena. Diperkirakan jumlah masyarakat pendatang yang tertampung di pengungsian Wamena berjumlah 5.500 jiwa. Lokasi pengungsian masyarakat Wamena tersebut di beberapa titik yakni di Markas Komando Distrik Militer 1702 Jayawijaya, Polres Jayawijaya, Markas Komando Rayon Militer Wamena, Gedung DPRD Jayawijaya, dan Markas Yonif Wi Mane Sili 756. Kerusuhan Wamena disebabkan berbagai kecemburuan ekonomi dan suku. Selain itu juga dipicu adanya pengibaran Bendera Bintang Kejora sebagai simbol perlawanan OPM kepada Masyarakat Indonesia yang berada di Wamena. (Rachmawati 2019)

Pasca bergulirnya reformasi sistem tanah adat diberlakukan kembali di Papua, yaitu sistem tersebut yang telah dihapus pada masa Orde Baru diberlakukan kembali oleh tetua adat kepada seluruh masyarakat pendatang di Papua. Pada saat kerusuhan Papua rumah-rumah masyarakat transmigran yang berbentuk permanen ditandai dan akan diambil paksa oleh masyarakat Papua, sehingga menjadikan mereka khawatir akan perkembangan keamanan Papua ke depan. (Suud 2022)

### Rekonstruksi Identitas Beragama

Terdapat 4 agama besar di Papua, yakni Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Di bawah ini merupakan sensus agama penduduk di Provinsi Papua pada tahun 2020: (Badan Pusat Statistik 2020)

Kabupaten	Islam 2020	Protestan 2020	Katolik 2020	Hindu 2020	Budha 2020
Merauke	131.162	45.731	103.135	459	223
Jayawijaya	9.875	117.703	113.702	112	-
Jayapura	34.069	150.327	293	233	196
Nabire	29.699	60.335	150.33	477	259
Kepulauan Yapen	10.973	113.868	2.045	47	22
Biak Numfor	3.004	118.501	3.546	150	301
Paniai	8.827	16.179	46.343	38	-
Puncak Jaya	2.533	11.879	21.755	10	-
Mimika	1.568	71.892	111.844	439	204
Boven Digoel	1.016	208	462	160	70

Mappi	9.915	21.776	93.366	50	27
Asmat	8.999	28.272	62.542	23	-
Yahukimo	5.985	284.775	986	48	-
Pegunungan Bintang	347	59.701	22.772	1	-
Tolikara	932	297.212	209	2	-
Sarmi	6.706	29.311	152	35	-
Keerom	2.705	22.506	17.661	366	15
Waropen	9.722	34.661	1.777	20	-
Supiori	486	18.975	162	10	-
Mamberamo Raya	2.031	7.035	135	-	6
Nduga	288	10.6825	685	-	-
Lanny Jaya	379	167	2.315	-	-
Mamberamo Tengah	199	9.314	719	-	-
Yalimo	641	116.732	3.331	-	-
Puncak	2.533	17.2975	20.832	-	-
Dogiyai	105	13.337	68.433	-	-
Intan Jaya	561	70.262	27.654	4	-
Deiyai	302	9.609	37.766	-	-
Kota Jayapura	182.619	130.063	84.478	741	1237
Provinsi Papua	519.562	2.434.467	949.120	3.425	2.560

Meskipun agama-agama besar tersebut telah masuk di Papua sejak wilayah ini bergabung dengan Indonesia, tetapi etnis Papua pedalaman masih dominan menganut kepercayaan lokal. Kaum pedalaman inilah selanjutnya menjadi perhatian serius dari dakwah agama-agama yang diakui di Indonesia, khususnya Islam dan Kristen. Kontestasi penyebaran Islam dan Kristen di pedalaman telah berlangsung lama, bahkan sudah terjadi sejak era kolonoalisme Belanda di Papua. Secara perlahan, dakwah Islam sendiri mendapat sambutan yang baik dari para tetua adat pedalaman, sehingga para penggerak Islam dapat memobilisasi berbagai bantuan, termasuk baju dan celana, untuk diserahkan kepada kaum muallaf yang belum memakai baju. (Mashad 2020, 267)

### Bina Toleransi Beragama

Training moderasi dan sosialisasi moderasi beragama yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dan pemuka agama-agama di Papua telah meningkatkan nasionalisme dan toleransi beragama di Papua mayoritas masyarakat Papua menggelorakan sikap moderat dan cinta tanah air. Data tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BLAM (Balai Litbang Agama Makassar), menunjukkan gejala positif nasionalisme Papua. dan menyimpulkan bahwa perspektif kebangsaan di kalangan siswa Kristen Papua sangat baik jumlah presentasi respon positif siswa terhadap nasionalisme “sangat tinggi” antara 74,5% - 97,5%, nilai tertinggi berisi tentang harapan Pancasila dan kesejahteraan, sedangkan nilai yang paling rendah berisi tentang disfungsi Pancasila dan perkembangan harapan (74,5%). (Saprillah 2019, 118)

Demikian halnya dengan toleransi dan moderasi beragama di Papua. Berdasarkan survei yang dilakukan KEMENAG pada tahun 2021, untuk Papua Barat 78,63%, dan Papua 80,20%. (Ayu 2021) Hubungan antaragama di Papua berjalan kondusif dan dipenuhi rasa toleransi yang besar. Menurut antropolog Muhammad Ihsan Tanggok, bahwa toleransi dan harmoni antaragama di Papua terjadi dalam kehidupan sehari-hari hingga institusi pendidikan. Menurutnya terdapat tiga institusi pendidikan yang berperan besar dalam mengokohkan harmoni di Papua yakni; NU, Muhammadiyah, dan Yapis.

Toni Wanggai, Ketua PWNU Papua, menyatakan bahwa pendekatan kultural di Bumi Cenderawasih terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Papua agama merupakan bagian penting dalam sistem sosiokultural yang berprinsip pada *satu tungku tiga batu*. Frasa batu meliputi pemerintah, adat, dan agama, sedangkan tiga batu didefinisikan dengan tiga agama besar Papua, yakni Islam, Kristen, dan Katolik. Meskipun demikian dalam praktiknya terdapat Hindu, dan Budha yang berperan besar dalam harmonisasi di Papua. (Nasrullah 2021) Kecenderungan demikian juga disebutkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas, bahwa Papua merupakan tanah damai. Meskipun umat Kristiani sebagai mayoritas di Papua, mereka mampu menjaga kerukunan antar umat beragama, serta merawat kehidupan berbangsa dan bernegara di Papua. Menurutnya, toleransi merupakan modal besar dalam membangun Papua yang damai, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Kerukunan umat beragama di Papua terjalin dalam kebersamaan serta saling menghargai perbedaan dalam berkeyakinan. Sejalan dengan pandangan Yaqut, Ketua Persatuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) Pdt Hizkia Rollo menilai kerukunan beragama di Papua akan menjadi modal kesatuan bagi umat beragama di Papua dengan tetap berkolaborasi bersama pemerintah. (Wisanggeni G 2022)

Upaya-upaya moderasi beragama juga dilakukan oleh organisasi sosial-keagamaan di Papua. Di kalangan muslim seperti Muhammadiyah, NU, MUI Papua, Yapis, dan MMP. Sedangkan terdapat pihak non-muslim seperti kalangan Kristen, Hindu, dan Budha. Muhammadiyah bekerjasama dengan FKUB membangun perdamaian dan toleransi beragama. Menurut wakil FKUB Papua pdt Lipiyus Biniluk secara statistik mayoritas penduduk Papua ialah Kristen. Tetapi secara heterogenitas dan kebangsaan perdamaian di Papua berjalan baik dan terpelihara, akan tetapi masih terdapat riak-riak kecil dan konflik-konflik yang terjadi berdasarkan kepentingan suatu golongan menurutnya jarang terjadi konflik antaragama di Papua. Muhammadiyah juga turut serta dalam mendirikan FKUB Papua, dan banyak jajaran Muhammadiyah Papua yang berkecimpung di FKUB dalam membangun kebersamaan di Papua, Muhammadiyah juga telah melaksanakan penyuluhan toleransi dan moderasi beragama di Papua sehingga mampu menjadikan organisasi tersebut semakin mapan dalam merancang stabilitas harmoni di Papua. (Suara Muhammadiyah 2022)

Begitupun NU dan MUI Papua, NU telah lama mengupayakan perdamaian di Papua khususnya saat kerusuhan Papua di era Gus Dur tahun 2000, masyarakat Papua menerima NU, menurut orang Papua Gus Dur merupakan bapak Demokrasi, dan bapak orang Papua. Saat Gus Dur meninggal orang Papualah yang pertama kali mengusulkannya untuk menjadi pahlawan nasional. NU juga sering berkolaborasi dengan umat Kristen dalam penyuluhan toleransi membangun Papua dengan kasih dan damai. (Iswidodo 2010)

MUI Papua merupakan wadah seluruh organisasi Islam di Papua, MUI Papua telah berkontribusi bagi Papua khususnya dalam berbagai situasi yang mencekam di Papua, salah satu kasus besar yang ditangani MUI Papua ialah masalah menara Masjid al Aqsha bersama MUI Jayapura pada akhirnya permasalahan tersebut telah terselesaikan, kasus menara yang dibangun masjid al Aqsa menjadi polemik bagi gereja di dekat Masjid al Aqsa, kasus tersebut berlarut hingga pada akhirnya MUI melakukan mediasi antara pengurus al Aqsha, Masyarakat Islam Jayapura, dan pengurus gereja yang mempersoalkan pembangunan menara tersebut. Persekutuan Gereja-Gereja menuntut bahwa menara tersebut harus dibongkar pembangunan menara tersebut, PGGI menilai pembangunan menara tersebut melangkahi gereja di depan al Aqsha, sehingga menurut PGGI hal tersebut merusak harmoni di Jayapura.

Sebagai bentuk perlawanan umat Islam Jayapura di atas menara al Aqsha yang belum selesai pembangunannya masyarakat menancapkan bendera merah putih sebagai aksi balasan bahwa mereka masih cinta damai dan memperjuangkan toleransi. Pengurus gereja memaksa agar menara tersebut dibongkar dan mengultimatum jika tidak maka gereja akan melakukan tindakan yang lebih serius, pada akhirnya melalui MUI dan Kemenag permasalahan tersebut tuntas dan pembangunan menara tetap berjalan. (Priliawito and Ginanjar Mukti 2018) Selain pembangunan menara al Aqsha, MUI Papua juga turut melakukan mediasi terhadap kasus Ust Ja'far Umar Thalib kepada masyarakat Islam dan non-Muslim, Ust Ja'far dinilai telah meresahkan masyarakat sebab dakwahnya cenderung menggunakan pendekatan yang kasar dan kurang mengedepankan nilai-nilai Nusantara. Menurut Faisal Shaleh banyak laporan dari masyarakat yang mengadu ke MUI Papua disebabkan kehadiran Ust Ja'far kurang bersahabat. (Saleh 2022)

Yapis merupakan yayasan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, yayasan ini didirikan pada 15 Desember 1968 setahun sebelum Papua bergabung kepada Indonesia. Latar belakang berdirinya tidak lepas dari kesadaran tokoh Islam Papua, mereka menyadari Islam telah berada di Papua lebih dari ratusan tahun ternyata pendidikan Islam tertinggal dari Kristen oleh sebab itu yayasan ini didirikan agar mengimbangi kekuatan pendidikan Kristen di Papua. Hingga kini Yapis telah memiliki 19 cabang di seluruh kota dan kabupaten di Papua, Yapis memiliki 179 sekolah dan 80 sekolah mitra Yapis di Papua mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga SLTA. Selain itu Yapis juga memiliki 4 Perguruan Tinggi, pada 19 April 2008 yayasan ini telah membuka S2 di kampus mereka. Yapis turut serta menguatkan perdamaian melalui jalur pendidikan dengan bekerjasama dengan Muhammadiyah dan Kemenag. Sekolah yang didirikan Yapis terbuka untuk semua kalangan dan agama, pendidikan Yapis tidak memandang suku, ras, dan agama semuanya melebur dalam satu pendidikan yang dinaungi Yapis, yayasan ini termasuk salah satu yayasan yang tertua di Papua dan menjadi aset yang dimiliki umat Islam Papua. (Wanggai 2009, 170)

Terdapat organisasi Islam yang asli didirikan masyarakat Papua terlepas dari MUI, NU, dan Muhammadiyah, organisasi tersebut ialah MMP (Majelis Muslim Papua). MMP merupakan ekspresi dakwah Islam lokal Islam Papua, organisasi ini dibentuk pada 2007 atas prakarsa suku-suku Islam di Papua, tujuan organisasi ini disamping memelihara perdamaian dan toleransi di Papua ialah mewujudkan masyarakat Papua yang cerdas, produktif, berakhlak mulia, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan itu MMP berupaya membumikan konsep kasih sayang bagi semesta dengan beberapa prinsip

sebagai acuan, yakni; moderat (*tawassuth*), adil (*i'tidal*), toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), dan asas kebersamaan (*tawasyur*). (Mashad 2020, 307)

MMP juga melakukan bina toleransi bersama AFKN (Yayasan Al-Fatih Kaffah). Bina toleransi tersebut digalakkan kepada masyarakat muslim Papua dan mualaf Papua pembinaan tersebut bertujuan agar iman mereka kokoh dan menumbuhkan jiwa perdamaian kepada sesama masyarakat Papua muslim dan non muslim, maupun kepada pendatang yang berasal dari luar Papua. Terkadang AFKN juga melakukan penataran bagi dai-dai muda Papua dengan mendatangkan dai dari Jakarta. AFKN juga mengupayakan kemandirian bagi masyarakat Papua tujuan utamanya ialah agar potensi di wilayah tersebut tumbuh. (Mashad 2020, 302)

Selain usaha dari internal Islam terdapat usaha dari eksternal Islam untuk mewujudkan Papua yang damai seperti agama Kristen, Hindu, dan Budha. Kristen merupakan agama mayoritas yang dianut di Papua, pemuka agama Kristen turut berperan dalam mensosialisasikan Papua tanah damai bangun Papua dengan kasih dan sayang. Berbagai upaya telah dilakukan agama ini seperti penyuluhan harmoni dan toleransi, dan dialog lintas agama, dialog damai digagas oleh Pdt. Neles Tebai selaku Imam Projo Keuskupan Jayapura. Umat Kristen yang diwakili Pdt. Neles Tebai juga menyerukan kepada para pejabat agar menanamkan dialog sebagai nilai kehidupan untuk membuka hati, mendukung perjuangan demi mewujudkan Papua yang damai. (Senap 2020)

Selain agama Kristen terdapat agama Hindu turut serta dalam membangun perdamaian di Papua salah satu program agama tersebut ialah dengan memperkenalkan tari kecak ala Papua, di mana penari kecak menggunakan baju adat Papua. Program agama Hindu tersebut didukung oleh ISBI (Institut Seni Budaya Indonesia) Tanah Papua menurut I Wayan Rai selaku Rektor ISBI Papua tari kecak merupakan bentuk hubungan antaragama dan sebagai ajang pemersatu bangsa dan menguatkan hubungan pemerintah dengan semua agama yang ada di Jayapura dan Papua. sebab dalam tari kecak tersebut penarinya ada yang Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, semuanya menyatu dalam tari kecak. (Rai S and dkk 2020, 130)

Meskipun Hindu dan Budha menjadi agama minoritas di Papua kontribusi mereka dalam pembangunan perdamaian di Papua tidak dapat dianggap remeh tanpa 2 agama minoritas tersebut harmoni di Papua belum dapat dicapai secara penuh, adapun kontribusi Budha bagi perdamaian Papua yakni melalui organisasi Permabudhi Papua, dan bimas Budha Kanwil Papua melakukan sosialisasi moderasi agama Budha, agama Budha komitmen dalam melakukan moderasi bersama di Papua serta mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menghargai perbedaan. (Anggraeni 2022)

Waicang merupakan salah satu masyarakat Kristen di desa tersebut dia mengapresiasi toleransi dan kerukunan di lingkungannya. Tidak terjadi perbedaan antara agama satu dengan agama lainnya semuanya sama dan sudah berlangsung sejak kedatangan pertamanya dari Kemtuk Gresi pada 1986. (Waicang 2022) Selain Waicang, terdapat Kasyanto selaku warga Hindu yang menyatakan bahwa toleransi di lingkungannya bagus, baik hubungan antara Hindu kepada agama lainnya dan kompak dalam kegiatan sosial lainnya warga Hindu menerima kebaikan dari agama lainnya dari Islam mereka membersihkan tempat ibadah kami dan kami menyambutnya, selain itu kepada Kristen kami juga sering menyumbang dalam kegiatan-kegiatan mereka sebagai wujud toleransi beragama

dilingkungan ini. (Kasyanto 2022) Begitupun respon toleransi dari masyarakat Budha menurut Tukiman dan Prayitno (Prayitno 2022) selaku pemeluk Budha menuturkan toleransi di lingkungan mereka bagus, umat Budha juga berpedoman kepada Pancasila Budhis khususnya sila kemanusiaan, di lingkup kampung ini tidak ada kesenjangan antaragama semua yang dijalankan bahu membahu semua agama disini saling membantu di masjid kami ikut membantu di Vihara Islam juga membantu membersihkan, dan baksos, dalam silaturahmi juga demikian khususnya di hari raya Waisak kami terbuka saling silaturahmi (*enjangsono*), semua berkunjung tanpa membedakan agama dan tingkatan sosial. (Tukiman 2022)

## **Dampak Moderasi Beragama**

Papua merupakan salah satu provinsi yang memperoleh tingkat index KUB yang tinggi di Indonesia. Data tersebut berdasarkan index KUB (Kerukunan Umat Beragama) Papua menduduki peringkat kedua di bawah NTT dengan angka 80,20. (nidma 2022) Terdapat 3 dampak dari moderasi beragama yang ada di Papua, yaitu; 1. Kemajemukan dan Heterogenitas, 2. Sikap Sepenanggungan, dan 3. Dukungan Agamawan.

### **1. Kemajemukan dan Heterogenitas**

Papua merupakan provinsi yang heterogen dan majemuk baik dari agama, suku, dan budayanya, kemajemukan tersebut merupakan dampak sikap moderat dan toleransi antaragama. Heterogenitas tersebut tampak di kota-kota yang ada di Papua seperti Sorong, Merauke, Nabire, Jayapura, Sarmi, Fak-Fak, Timika dan wilayah Pantai Papua. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah aman, toleran, damai di Papua kondisi heterogenitas berpengaruh dalam sistem pengambilan kebijakan dari pemerintah dan pemuka agama-agama sehingga memunculkan perdamaian, berbanding terbalik dengan wilayah yang heterogenitasnya rendah seperti Tolikara, Puncak Jaya, Lani Jaya, dan daerah pegunungan di Papua yang jarang dihuni masyarakat pendatang dan Orang Pantai Papua yang terbuka, rendahnya kemajemukan menjadikan suku lokal menerapkan kebijakan lokal mereka atas penguasaan tanah sehingga menjadi penghambat reformasi dan perubahan di wilayah tersebut. (Pemerintah Provinsi Papua 2022)

### **2. Sikap Sepenanggungan**

Masyarakat pendatang, Papua pantai, dan Papua Non OPM memiliki sikap sepenanggungan dan toleransi yang tinggi. Sikap tersebut dilakukan karena mereka satu atap yakni satu Papua, sikap tersebut diimplementasikan dalam bentuk toleransi, tolong menolong, dan menghargai kebebasan pendapat serta memeluk agama, menurut Supri selaku masyarakat transmigrasi dari Jawa yang ke Papua sikap tersebut sudah terjadi sejak Papua di masa Orde Baru orang Papua ramah, dan bersahabat dengan pendatang jika masyarakat tidak bersatu maka akan ada pihak yang memanfaatkannya. Sikap sepenanggungan sudah seharusnya dilaksanakan sebab jika tidak bisa jadi masyarakat yang tidak memihak OPM akan diserang dan akan hancur persatuan dalam kehidupan kita. Sikap sepenanggungan mengajarkan untuk berbenah dan terbuka agar perdamaian di Papua terjalin, perdamaian tanpa memandang ras, suku, agama, dan budaya semua menjadi satu demi kemajuan

Papua. (Supri 2022)

### 3. Dukungan Agamawan

Dukungan pemuka agama menjadi salah satu alasan mengapa harmoni di Papua dapat berjalan dengan baik, pemuka agama dari Islam, Kristen, Hindu, dan Budha menjadi agen pelopor harmoni dan toleransi di Papua, berbagai sosialisasi dan pelatihan moderasi telah dilakukan demi mewujudkan Papua yang santun, dan beradab. Ketua MUI Papua Ust Syaiful Islam al Payage mendukung terciptanya moderasi beragama dan perdamaian di Papua. Ust Payage menyampaikan MUI bersama umat Islam Papua senantiasa berupaya menjadi garda terdepan dalam menjaga harmoni dan toleransi beragama di Papua. (Fazeri 2018)

Selain MUI dan kalangan Islam pemimpin Kristen MR. Kambu, dari Gereja Bethel Gereja Pentakosta (GBGP) di Tanah Papua. Turut mendukung perdamaian dan harmoni di Papua, dan menyatakan umat beragama di Papua ini merupakan bagian integral bangsa dan NKRI. Suka duka serta harapan umat beragama Papua khususnya jemaat GBGP jangan merasa sendiri di Papua, Kambu mengajak seluruh umat beragama di Papua agar tetap menjalankan hubungan yang harmonis antarumat beragama, hidup rukun dan damai berdasarkan keyakinan agamanya masing-masing. (Kementerian Agama 2006)

Begitupun umat Hindu bersama Islam, Kristen, dan Budha empat agama tersebut telah bersama-sama mendeklarasikan perdamaian bagi Papua pada 2006, dan menghimbau umatnya masing-masing agar tidak terpancing dengan isu-isu yang berkembang di Papua dan tetaplah menjadikan Papua sebagai zona damai, adapun 5 tokoh dari empat agama tersebut yakni Ketua MUI Papua KH. Zubeir D Hussen, Uskup Jayapura Uskup Leo L Labaladjar, ketua PHDI I Wayan Sudha, Sekertaris Budha Yana Papua Pandita Arya Bodhi Jasmani, dan Ketua Sinode GKI Papua Herman Saud. Dukungan penuh pemuka agama tersebut menjadi penggerak harmoni di Papua tujuan dari semua agama tersebut ialah menjadikan Papua toleran, damai, dan mandiri membangun Papua tanpa memandang suku, ras, dan agama. (Oetomo 2005)

### PENUTUP

Artikel ini dapat menyimpulkan bahwa: *Pertama*, peristiwa konflik 1998-2001 di Papua telah mengajarkan pentingnya sikap untuk menghargai perbedaan. Munculnya konflik tersebut secara garis besar disebabkan kurangnya sikap nasionalisme dan menghargai sesama. *Kedua*, upaya moderasi keagamaan pasca konflik telah dilakukan segenap agama dan ormas di Papua. Adapun bentuk upaya moderasi tersebut dilakukan melalui penyuluhan arti pentingnya moderasi beragama, kesadaran untuk terus berbenah demi menyongsong masa depan Papua, dan training moderasi keagamaan yang rutin dilakukan oleh Kemenag dan 4 agama besar di Papua. *Ketiga*, moderasi keagamaan di Papua memberikan dampak yang besar bagi aspek sosial dan agama. Hal ini antara lain muncul istilah-istilah seperti saudara tetangga, meski tidak ada hubungan darah atau kekerabatan mereka menganggap tetangga sebagai saudara sebab mereka hidup berdampingan dan berinteraksi setiap hari. Persaudaraan di Papua tidak memandang agama, suku, dan budaya. Isu-isu seputar Papua merdeka merupakan isu yang merusak harmoni di Papua sebab banyak masyarakat asli Papua dan pendatang yang mendukung

terciptanya perdamaian dan harmoni di Papua. Isu kemerdekaan merupakan permainan OPM yang digunakan untuk menteror masyarakat sipil dan elemen-elemen pemerintah, agar tercipta Papua yang jauh dari harmoni dan damai.



## BIBLIOGRAFI

- Abdurrahman, Dudung. 2019. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Alwi, Habib. 2016. *Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoritis*. Mataram: IAIN MATARAM.
- Anggraeni, Dewi. 2022. "Kemenag Kanwil Papua." 2022. <https://papua.kemenag.go.id/?a=daftarvideo&id=1136#!/detail/dd34d9fc-625b-4706-94b1-0496ae0c35a0#topPage>.
- Ayu, Dewi Indah. 2021. "Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021 Masuk Kategori Baik." 2021. <https://www.kemenag.go.id/read/indeks-kerukunan-umat-beragama-tahun-2021-masuk-kategori-baik>.
- Badan Pusat Statistik. 2020. "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Dan Agama Yang Dianut Di Provinsi Papua (Jiwa)." 2020. <https://papua.bps.go.id/indicator/12/577/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-papua.html>.
- Elisabeth, Adriana, Muridan S Widjojo, and Cahyo Pamungkas. 2005. *Agenda Dan Potensi Damai di Papua*. Jakarta: LIPI.
- Fazeri, Achmad. 2018. "MUI: Hubungan Antar Umat Beragama di Papua Kondusif." Hidayatullah.com. April 4, 2018. <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2018/04/04/139671/mui-hubungan-antar-umat-beragama-di-papua-kondusif.html>.
- Hakim, Luqman Al. 2022a. "MUI Papua dan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jayapura, 1993-2010 M." Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- . 2022b. "Multiculturalism and Allegations of Islamization at Jayapura Regency, Papua, Indonesia in the Post-Reform, 1998-2015." *SEJARAH: Journal of the Department of History* 31, no. 2 (December) (December). <https://doi.org/10.22452/sejarah.vol31no2.9>.
- Hakim, Muhammad Lukman. 2021. *Agama Dan Perubahan Sosial*. Malang: Media Nusa Creative.
- Hamid, Idrus al. 2019. "Agama, Segregasi Ekonomi, Dan Pemberdayaan Masyarakat Jayapura Papua." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (April): 74–96.
- Human Rights Watch, Team. 1998. "Masalah Kekerasan Di Irian Jaya | Human Rights Watch." 1998. <https://www.hrw.org/id/news/1998/07/07/247181>.
- Iswidodo. 2010. "NU Perekat NKRI Di Papua - TribunNews.Com." 2010. <https://www.tribunnews.com/nasional/2010/03/25/nu-perekat-nkri-di-papua>.
- Kasyanto. 2022. Toleransi Hindu kepada Agama Lainnya.

- Kementerian Agama. 2006. "Umat Beragama Papua Bagian Integral Bangsa Indonesia." 2006. <https://kemenag.go.id/read/umat-beragama-papua-bagian-integral-bangsa-indonesia-5e6n>.
- . 2019. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Makatita, Ahmad Syarif, Natasya Aulia Husain, and Abdul Aziz Harahap. 2022. "Maintaining Inter-Religious Harmony through Acculturation of the Local Tradition in the Dani Muslim Community, Papua." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 30, no. 1 (May): 59–78.
- Mambraku, Nomensen ST. 2016. "PENYELESAIAN KONFLIK DI TANAH PAPUA DALAM PERSPEKTIF POLITIK." *Kajian* 20, no. 2 (September): 75–85. <https://doi.org/10.22212/kajian.v20i2.571>.
- Martanto, Ucu. 2007. "Perubahan Lingkungan Dan Konflik Kekerasan Membaca Papua Melalui Pendekatan Environmental Security." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11, no. 2: 173–92. <https://doi.org/10.22146/jsp.10995>.
- Mashad, Dhurorudin. 2020. *Muslim Papua Membangun Harmoni Berdasar Sejarah Agama Di Bumi Cenderawasih*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Metray, Bernarda. 2015. "The Strengthening of Nasionalism Among The People of Papua, Indonesia," *Journal of Humanity* 3, no. 2.
- Metray, Bernarda, and Yan Dirk Wabiser. 2019. "Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia Di Kalangan Orang Papua 1963-1969." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 45, no. 1.
- Muryantini, Sri. 2018. "Konflik Otonomi Khusus Papua Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Di Indonesia." *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan* 20, no. 1 (November). <https://doi.org/10.31315/paradigma.v20i1.2444>.
- Nasrullah, Nashih. 2021. "PWNU Ungkap Harmoni Antarumat Beragama di Papua." *Republika Online*. August 18, 2021. <https://republika.co.id/share/qy1hd6320>.
- nidma. 2022. "Indeks Kerukunan Umat Beragama 2021: Papua dan Papua Barat di Peringkat Atas." *West Papua Tabloid* (blog). January 2, 2022. <https://westpapatabloid.org/indeks-kerukunan-umat-beragama-2021-papua-dan-papua-barat-di-peringkat-atas.html>.
- Oetomo, Lita. 2005. "Masyarakat Pedalaman Papua Bentuk Polisi Adat - Nasional Tempo.Co." 2005. <https://nasional.tempo.co/read/64935/masyarakat-pedalaman-papua-bentuk-polisi-adat>.
- Pemerintah Provinsi Papua. 2022. "Kondisi Sosial Budaya Komunitas Lokal." 2022. <https://papua.go.id/view-detail-kabupaten-174/kondisi-sosial-budaya-komunitas-lokal.html>.
- Prayitno. 2022. Toleransi Budha dan Kondisi Sosial.
- Priliawito, Eko, and Fajar Ginanjar Mukti. 2018. "Ini Menara Masjid Al-Aqsha Sentani yang Dituntut Dibongkar." March 17, 2018. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1017419-ini-menara-masjid-al-aqsha-sentani-yang-dituntut-dibongkar>.
- Pulungan, M Sofyan. 2017. "DINAMIKA KONFLIK DI PAPUA PASCA ORDE BARU." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, no. 4 (June): 516. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no4.1423>.

- Rachmawati. 2019. "Kerusuhan Wamena: Trauma Konflik Di Tahun 2000 Dengan Korban Meninggal Capai 31 Orang Halaman All - Kompas.Com." 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/09/27/11010041/kerusuhan-wamena--trauma-konflik-di-tahun-2000-dengan-korban-meninggal-capai?page=all>.
- Rai S, I Wayan, and dkk. 2020. *Merajut Kerukunan DI Jayapura Diaspora Ethnis Bali Penyung Pura Agung Surya Buvana*. Mimika: Aseni dan ISBI Papua.
- Ridwan, Ridwan. 2022. "Radikalisme Islam, Pembangunan Perdamaian Dan Dialog Antar Agama Di Papua Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (September): 69–84. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v21i1.7262>.
- Saleh, Faisal. 2022. Peran MUI Sebagai Mediator Pasca 2001.
- Saprillah, Saprillah. 2019. "SISWA PAPUA DAN NASIONALISME YANG BAIK-BAIK SAJA?" *MIMIKRI* 5, no. 2: 116–23.
- Senap, Maryo. 2020. "Portal Berita Papua No. 1." August 5, 2020. <https://arsip.jubi.id/>.
- Setyaningrum, Puspasari. 2022. "Kondisi Geografis Pulau Papua Berdasarkan Peta: Letak, Luas, Dan Kondisi Alam Halaman All - Kompas.Com." 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/08/06/194256378/kondisi-geografis-pulau-papua-berdasarkan-peta-letak-luas-dan-kondisi-alam?page=all>.
- Siswanto, Eko. 2016. *Potret Kerukunan Antarumat Beragama Masyarakat Kota Jayapura Dalam Perspektif Masalah Indikator Sukses Pemerintah Kota Jayapura Dalam Menciptakan Kerukunan Antarumat Beragama*. Yogyakarta: Idea Press.
- Suara Muhammadiyah. 2022. "Bersama Menjaga Kerukunan di Papua - Suara Muhammadiyah." 2022. <https://suaramuhammadiyah.id/2022/05/25/bersama-menjaga-kerukunan-di-papua/>.
- Sugandi, Yulia. 2008. *Analisis Konflik Dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Supri. 2022. Sikap Toleransi di Papua.
- Suud. 2022. Geger Papua.
- Tukiman. 2022. Toleransi Budha dan Agama Lainnya.
- Waicang. 2022. Toleransi Beragama di Desa Transmigran.
- Wanggai, Toni Victor M. 2009. *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam Di Tanah Papua*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Wisanggeni G, Aryo. 2022. "Menteri Agama Apresiasi Toleransi Antar Umat Beragama Di Papua | Jubi.Id." 2022. <https://jubi.id/berita-papua/2022/menteri-agama-apresiasi-toleransi-antar-umat-beragama-di-papua/>.



# **JURNAL SOSIOLOGI AGAMA**

**Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial**

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

